

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan “*nexus of contract*”. Agen berperan sebagai pihak yang diberikan kontrak oleh *principal* untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori keagenan dapat diartikan dimana adanya suatu hubungan diantara 2 pihak yaitu *principal* dan agen yang diperintah untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang mengatasnamakan *principal* dan memberikan kebebasan penuh untuk agen dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas publik, pihak yang diberikan amanah (agen) mempunyai kewajiban berupa tanggungjawab untuk melaporkan, mencatatat serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada *principal* sebagai pihak pemberi amanah dimana pihak *principal* ini mempunyai hak untuk menagih hal tersebut. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua yaitu:

1) akuntabilitas vertical yaitu suatu bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana kepada pihak yang lebih tinggi, dan 2) akuntabilitas horizontal yaitu suatu bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana kepada masyarakat luas.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai *principal* untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan .

## **2. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)**

Teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan kondisi dimana manajer tidak berkeinginan untuk memenuhi tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih fokus untuk tujuan utama mereka yaitu mendahulukan kepentingan organisasi. Teori ini memiliki akar psikologi dan sosiologi yang dibuat untuk menjelaskan situasi dimana para manajer yang berperan sebagai *steward* akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991). Pada saat

terjadi perbedaan tujuan diantara kedua pihak, maka steward akan lebih memilih untuk bekerja sama daripada menentanginya dikarenakan steward lebih mempertimbangkan tercapainya tujuan utama organisasi. Teori ini didesain untuk peneliti dalam menguji situasi dimana para pimpinan didalam organisasi pemerintah daerah sebagai *steward* dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya* yaitu masyarakat.

Pada *stewardship theory, model of man* didasarkan pada steward yang dibentuk untuk selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, mempunyai perilaku kolektif dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku *selfserving* atau pro-organisasional, perilaku untuk terus memberikan pelayanan tidak akan dipisahkan dengan kepentingan organisasi, yang berarti bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para *steward* berada. *Steward* akan mengalihkan perilaku *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Para ahli dari teori *stewardship* berspekulasi bahwa ada korelasi antara suksesnya sebuah organisasi dengan tingkat kepuasan *principal*.

Kesuksesan *steward* dapat dinilai dari meningkatnya kinerja yang dihasilkan serta dapat memberikan manfaat pada sebagian besar organisasi lain, sebab sebagian *shareholder* memiliki kepentingan yang dimana telah terpenuhi melalui tercapainya kemakmuran organisasi. *Steward* yang pro terhadap organisasi akan termotivasi untuk

memaksimalkan kinerja. Keterkaitan adanya teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah dimana pemerintah daerah berperan sebagai *steward* akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, selain dengan memberikan pelayanan publik yang baik pemerintah daerah juga diwajibkan untuk membuat sebuah laporan keuangan yang jujur sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya.

### **3. Kualitas Laporan Keuangan**

Definisi laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan dari segala aktivitas transaksi yang telah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan sebenarnya merupakan pernyataan dari pihak manajemen pemerintah dalam menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan selain itu pembuatan laporan keuangan membantu pemerintah dalam memenuhi akuntabilitas terhadap publik. Pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk membagi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan umum.

Dibuatnya laporan keuangan itu sendiri harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan dikatakan baik dan berkualitas apabila

memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 antara lain:

1) Relevan, yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna sehingga membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini maupun masa depan. Terdapat unsur-unsur dari informasi yang relevan, antara lain:

a) Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi dapat digunakan pengguna untuk mengoreksi keputusan di masa lalu.

b) Manfaat predictif (*predictive value*)

Informasi dapat digunakan pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan masa kini.

c) Tepat waktu (*timeliness*)

Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi.

d) Lengkap

Penyajian mengenai segala aktivitas dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dalam pemerintah daerah disajikan secara utuh tanpa adanya manipulasi sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2) Andal, merupakan suatu bentuk penyajian informasi yang bebas dari unsur penyesatan dan kesalahan salah saji material.

Karakteristik andal antara lain:

a) Jujur dalam penyajian

Informasi tentang penyajian dari setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi disajikan dengan jujur.

b) Dapat diverifikasi

Penyajian dalam laporan keuangan dapat dilakukan pengujian ulang tanpa merubah hasilnya.

c) Netralitas

Informasi yang disajikan tidak berpihak pada kepentingan tertentu tetapi untuk kebutuhan umum.

3) Dapat dibandingkan, adalah suatu bentuk perbandingan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya, maupun dibandingkan dengan organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama.

4) Dapat dipahami, adalah pengguna mampu memahami isi dari laporan keuangan dengan baik.

#### **4. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kebutuhan akan adanya sumber daya manusia dalam setiap jenis pekerjaan sangat penting dikarenakan pada setiap bagian dari pekerjaan itu sendiri pasti membutuhkan adanya sumber daya manusia. Setiap sumberdaya manusia harus memiliki suatu pengetahuan dan

kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Terdapat dua definisi menurut Hutapea dan Thoha (2008) yaitu:

a) Boyatzis (1982)

Kompetensi adalah kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tujuan utama organisasi dapat tercapai.

b) Woodruffle (1991) dan Woodruffle (1990)

Terdapat perbedaan pengertian antara *competence* dan *competency*, dimana *competence* itu sendiri merupakan kegiatan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul” pengertian *competency* itu sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan orang “dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (*competent*)”.

Jadi kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan utama organisasi.

Terdapat tiga komponen utama dalam membentuk kompetensi menurut Hutapea dan Thoha(2008),yaitu :

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) merupakan tingkat pengetahuan seseorang dalam bidang kompetensi yang dimiliki sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

- 2) Keterampilan (*skill*) adalah upaya yang dilakukan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
- 3) Sikap (*attitude*) adalah pola tindakan seseorang karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku.

## 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan baik untuk keperluan pribadi, bisnis maupun pemerintahan dan merupakan suatu informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. TI meliputi diantaranya komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan internet, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi yang berhubungan dengan teknologi Primayana, dkk., (2014)

Pemanfaatan (TI) dapat meliputi didalamnya (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dalam pelayanan publik dapat lebih mudah dan murah untuk diakses oleh masyarakat luas (Hamzah, 2009). Pemanfaatan ini juga dapat

diartikan sejauh mana perilaku karyawan dalam menggunakan teknologi informasi dalam tugasnya.

Komputer merupakan salah satu komponen yang termasuk dalam teknologi informasi merupakan suatu alat yang mampu melipatgandakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia terkadang bahkan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia dapat dikerjakan oleh komputer. Terdapat kelemahan dalam sistem komputer yang dimana cenderung kurang fleksibel serta tidak dapat dengan cepat beradaptasi apabila terdapat perubahan sistem perlu adanya percobaan dan pembuatan sistem yang membutuhkan waktu tidak sebentar dengan biaya pemasangan yang mahal.

## **6. Pengendalian Intern**

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai sebuah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan guna mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya organisasi dan memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern dapat terdiri dari prosedur dan kebijakan yang

diterapkan untuk mencapai tujuan dan menjamin tersedianya informasi yang keuangan yang andal serta menjamin ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

Sementara itu menurut Indriasari dan Naharyanto (2008), pengendalian intern adalah struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan dari organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Dalam Peraturan Pemerintah NO. 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa terdapat unsur-unsur pembentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) antara lain:

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian resiko
- c) Kegiatan pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern

## **7. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Nordiawan (2008) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yang dilakukan baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem dari organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup diantaranya kebijakan akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi. Tujuan dari diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal yang membutuhkan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Ringkasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu di sajikan dalam tabel 2.1. Dalam tabel tersebut di jelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta hasil yang di dapatkan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Andini, Dewi dan Yusrawati, (2015)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Variabel Independen: 1. Kompetensi SDM 2. Penerapan SAKD  Variabel Dependen: 1. Kualitas LKPD	Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Dewi, N.M.R.K, Sinarwati, N.K, Darmawan, N.A.S. (2014)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: 1. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah  Variabel Dependen: 1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.  2. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Putri, N.K.R, Darmawan, N.A.S, Werastuti, D.N.S. (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: 1. Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi 2. Sistem Pengendalian Internal  Variabel Dependen: 1. Kualitas Laporan Keuangan	1. Kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Winidyaningrum , C., dan Rahmawati. (2010)	Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi	Variabel Independen: 1. Sumber Daya Manusia 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi  Variabel Dependen: 1. Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah  Variabel Intervening: 1. Pengendalian Intern Akuntansi	1.Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  3.Sumberdaya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.  4.Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Setiawati,E dan Sari, S.P, (2014)	Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Penegendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi	Variabel Independen: 1. Sumber Daya Manusia 2. Penegendalian Intern 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Pemahaman Akuntansi  Variabel Dependen: 1. Kualitas Pelaporan Keuangan	1.Sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatn teknologi informasi dan pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Primayana, K.H, Atmadja, A.T, Darmawan, N.A.S. (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia, 2. Pengendalian Intern Akuntansi 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Pengawasan Keuangan Daerah  Variabel Dependen: 1. Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatn teknologi informasi dan pengawasankeuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Roviyantie, Devi. (2011)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Variabel Independen: 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  Variabel Dependen: 1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Rahayu, L., Kennedy dan Anisma, Y.(2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau	Variabel Independen: 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  Variabel Dependen: 1. Kualitas Laporan keuangan Daerah	1. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Syarifudin, Akhmad. (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM</li> <li>2. Peran Audit Intern</li> </ol> <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol> <p>Variabel Intervening :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.</li> <li>2. SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.</li> <li>3. Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap SPIP, sehingga tinggi tingkat kompetensi akan semakin meningkatkan efektifitas SPIP.</li> <li>4. Peran Audit Intern berpengaruh signifikan terhadap SPIP, sehingga semakin baik Peran Audit Intern maka penerapan SPIP semakin efektif.</li> <li>5. SPIP dapat memediasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD.</li> <li>6. SPIP tidak memediasi pengaruh Peran Audit Intern terhadap kualitas LKPD.</li> </ol>

### **C. Penurunan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.**

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sebuah organisasi dikarenakan setiap lini dari organisasi pasti membutuhkan sumber daya manusia. Dalam melakukan pekerjaannya tentunya harus mempunyai kompetensi sesuai bidangnya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki individu atau seseorang dalam suatu organisasi (kelembagaan) untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Begitu juga dalam pembuatan laporan keuangan daerah, diperlukan sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi. Dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Penelitian sebelumnya oleh Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014) dan penelitian Roviyantje (2011) juga menunjukkan hasil adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**H<sub>1</sub> : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.**

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.**

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meliputi diantaranya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah dalam akses pelayanan publik oleh masyarakat (Hamzah, 2009). Penggunaan komputer, *software* atau perangkat lunak lainnya yang sejenis secara optimal merupakan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini komputer memiliki peran yang penting dalam membantu peningkatan kualitas informasi dikarenakan komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan dibandingkan dengan sistem manual.

Penelitian tentang pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014) hasilnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Anggraeni dan Riduwan (2014) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Apabila teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

**H<sub>2</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.**

**3. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.**

Pengendalian intern meliputi diantaranya organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Masih ditemukannya kecurangan dan penyimpangan di dalam laporan keuangan daerah oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan daerah, BPK memberikan opini tidak wajar, tidak memberikan pendapat maupun wajar dengan pengecualian diantaranya disebabkan masalah pada sistem pengendalian intern yang masih lemah yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016).

Pengendalian intern yang lemah dapat mengakibatkan tidak dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan dalam proses akuntansi. Semakin kuat pengendalian intern yang dilakukan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Primayana, dkk., (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan dari pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian Udiyanti dkk., (2015) menunjukkan hasil

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian Setiawati dan Sari (2014) juga menunjukkan hasil pengaruh yang positif dari pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Yendrawati, Reni (2013) yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

**H<sub>3</sub> : Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.**

#### **4. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.**

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran belanja daerah (APBD) yang dilakukan baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan,2008). Sementara menurut Mahmudi (2010) mengutarakan bahwa sistem akuntansi pemerintah yang disusun untuk menjamin bahwa siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dan masalah, sebab apabila terdapat masalah pada salah satu siklus akuntansi tersebut dapat berakibat pada laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Apabila sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diterapkan pada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga sebaliknya, apabila tidak diterapkan dengan aturan maka laporan keuangan yang di hasilkan tidak berkualitas. Penelitian Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dari Roviyantje (2011) dan Rahayu, dkk., (2014) juga terdapat pengaruh signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**H<sub>4</sub> : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.**

#### **5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

Suatu organisasi dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan utamanya sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan dari sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Dalam organisasi sektor publik, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pelayanan yang baik dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik dari level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam penggunaan APBD, selain dengan memberikan

pelayanan publik yang baik juga membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Menurut Warisno (2008), sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah yang gagal dalam memahami serta menerapkan logika akuntansi dapat berdampak pada kekeliruan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi maka tidak akan kesulitan dalam menerapkan sistem akuntansi yang ada. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki akan berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

**H<sub>5</sub> : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.**

**6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah.**

Menurut Zeyn (2011), keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam sistem akuntansi keuangan

daerah itu sendiri memiliki ruang lingkup yang mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur akuntansi dan teknologi informasi.

Tentunya dalam setiap pemerintahan daerah memiliki sarana teknologi informasi, akan tetapi sarana tersebut sudah sesuai kebutuhan atau belum, sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan mempunyai teknologi informasi yang baik maka akan berdampak positif dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, karena semakin baik teknologi informasi yang ada dapat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan sistem akuntansi yang ada.

**H<sub>6</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.**

#### **7. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

Pengendalian intern dibutuhkan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2005). Penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik kualitatif keterandalan dan relevan. Penyebab dari ketidakandalan dalam laporan keuangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern dalam organisasi (Hevesi, 2005).

Menurut Mardiasmo (2002), sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal, relevan dan dapat dipercaya. Namun apabila sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan lemah menyebabkan pengendalian intern juga menjadi lemah pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan relevan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain apabila pengendalian intern itu kuat maka dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga semakin kuat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

**H<sub>7</sub> : Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.**

**8. Perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Cilacap dan Banyumas.**

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Pemerintah selaku regulator mencanangkan penerapan SAP berbasis akrual mulai 1 Januari 2015 untuk seluruh pemerintah daerah. Hal itu berarti kabupaten Cilacap dan Banyumas juga sudah menerapkan SAP berbasis akrual, akan tetapi kabupaten Banyumas menerapkan peraturan ini pada Tahun 2014 satu tahun lebih awal dari waktu yang ditetapkan Pemerintah.

Tentunya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 baik pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten

Banyumas memiliki satu pedoman dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dengan menggunakan satu pedoman peraturan yang sama maka seharusnya laporan keuangan yang dihasilkan dari kedua Kabupaten mendapatkan opini yang sama dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Akan tetapi dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan kedua Kabupaten menunjukkan hasil opini yang berbeda yang dimana Kabupaten Cilacap mendapatkan opini WDP sedangkan Kabupaten Banyumas mendapatkan opini WTP.

Hal ini menunjukkan bahwa antara kabupaten Cilacap dan Banyumas meskipun sudah menerapkan SAP berbasis akrual akan tetapi terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kualitas LKPD berbeda. Melihat dari hasil opini BPK atas LKPD antara kabupaten Cilacap dan Banyumas diasumsikan bahwa dari hasil uji kesamaan koefisien pada penelitian ini hasilnya terdapat perbedaan pengaruh pengaruh aspek personal dan aspek sistem di kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>3</sub> : Terdapat perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Banyumas**

#### **D. Analisis Komparatif Variabel dan Pengaruh Antar Variabel.**

Perbandingan kondisi dari pengendalian intern, penerapan SAKD dan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Banyumas..

## **1. Pengendalian Intern**

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengendalian intern. Dengan pengendalian intern yang baik maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat Kabupaten Banyumas, menunjukkan kualitas yang baik. Dengan kualitas laporan keuangan yang baik dapat dikatakan bahwa kondisi pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Banyumas juga baik. Sedangkan kondisi pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Cilacap belum terlalu baik, hal ini melihat dari laporan keuangan yang dibuat dimana masih mendapat opini WDP dari BPK.

## **2. Penerapan SAKD**

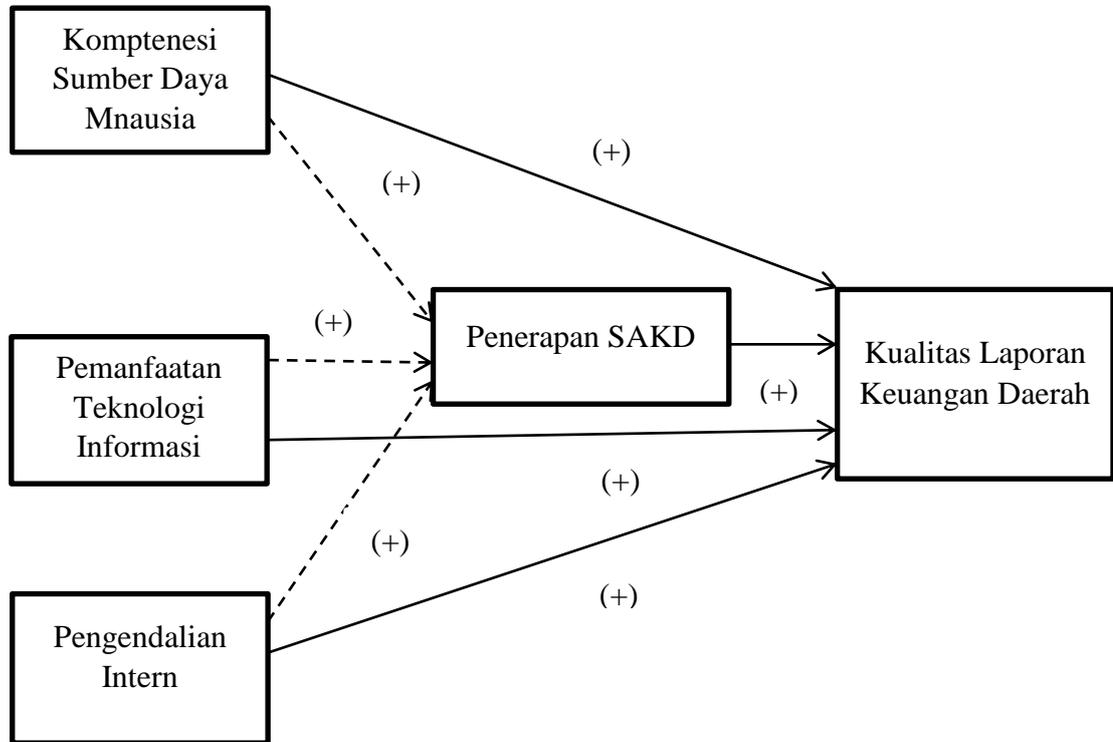
Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam setiap kegiatan ataupun kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan penggunaan APBD harus dicatat dalam laporan keuangan. Dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan dana maka akan tercapai akuntabilitas dan transparansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menilik dari laporan keuangan yang dihasilkan Kabupaten Banyumas sudah berkualitas baik, hal itu berarti setiap penggunaan APBD sudah di catat dalam laporan keuangan yang

menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Cilacap belum maksimal apabila melihat dari kualitas laporan keuangan.

### **3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Hasil dari audit pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilakukan BPK dapat dijadikan acuan untuk melihat kondisi kualitas laporan keuangan di masing – masing Kabupaten. Kabupaten Banyumas mendapat opini WTP atas laporan keuangan yang dibuat selama 5 tahun berturut-turut, berarti kualitas laporannya sudah baik. Berbeda dengan Kabupaten Cilacap yang dimana selama 5 tahun berturut-turut selalu mendapat opini WDP, hal ini menunjukkan kualitas laporan keuangan yang belum baik.

### E. Model Penelitian



**Gambar 2.1**

**Model Penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening.**